

**ANALISIS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN FISKAL
PADA PROVINSI SUMATERA SELATAN**



TESIS OLEH :

AHMAD SAYUDI RAHMAT HIDAYAT

01022682024015

ILMU EKONOMI - BKU AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Magister Sains

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2024

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Good Governance dalam Meningkatkan Kemandirian Fiskal pada Provinsi Sumatera Selatan

Nama Mahasiswa : Ahmad Sayudi Rahmat Hidayat

NIM : 01022682024015

Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi

Bidang Kajian Utama : Akuntansi

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Dr. Yulia Saftiana, S.E., M.Si., Ak
NIP. 1967070119920032003

Pembimbing Kedua,



Dr. Muizzuddin, S.E., M.M
NIP. 198711212014041001

Ketua Program Studi
Ilmu Ekonomi,



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

Plt. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya



Prof. Drs. H. Ismuhadi, M.B.A., Ph.D
NIP. 196211121989111001

Tanggal Lulus : 21 Juni 2024




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI**

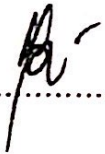
Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Inderalaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662
Tel: (0711) 580964, 580646 Fax:(0711) 580964
Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Laman:<http://fe.unsri@unsri.ac.id> – email : dekan@fe.unsri.ac.id

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Yulia Saftiana, S.E., M.Si., Ak
NIP. 1967070119920032003


(.....)

Sekretaris : Dr. Muizzuddin, S.E., M.M
NIP. 198711212014041001


(.....)

Anggota :

1. Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si.
NIP. 197007162008012015


(.....)

2. Dr. Relasari, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197212152003122001


(.....)



BUKTI TELAH MEMPERBAIKI TESIS
MAHAISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Yulia Saftiana, S.E., M.Si., Ak		26 Juni 2024
2.	Dr. Muizzuddin, S.E., M.M		26 Juni 2024
3.	Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si		28 Juni 2024
4.	Dr. Relasari, S.E., M.Si., Ak		28 Juni 2024

Menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Sayudi Rahmat Hidayat

NIM : 01022682024015

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Bidang Kajian Utama : Akuntansi

Judul Tesis : Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Good Governance dalam Meningkatkan Kemandirian Fiskal pada Provinsi Sumatera Selatan

Telah memperbaiki tesis hasil ujian

Palembang, 1 Juli 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si

NIP. 197007162008012015

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Sayudi Rahmat Hidayat
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 20 Desember 1982
Nim : 01022682024015
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi
Bidang Kajian : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi. Interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti tidak kebenaran dalam pernyataan diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian karya ilmiah.

Palembang, 5 Juli 2022

Ahmad Sayudi Rahmat Hidayat

01022682024015

PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Sayudi Rahmat Hidayat

Nim : 01022682024015

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Bidang Kajian : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul :

Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Good Governance dalam Meningkatkan Kemandirian Fiskal pada Provinsi Sumatera Selatan

Pembimbing :

Ketua : Dr. Yulia Saftiana, S.E., M.Si., Ak

Anggota : Dr. Muizzuddin, S.E., M.M

Tanggal Ujian : 21 Juni 2024

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam tesis ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya. Apabila tidak benar dikemudian hari, maka saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar magister.

Palembang, 5 Juli 20224



Ahmad Sayudi Rahmat Hidayat

01022682024015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Good Governance dalam Meningkatkan Kemandirian Fiskal pada Provinsi Sumatera Selatan”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata dua (S-2) Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama penelitian dan penyusunan karya ilmiah dalam tesis ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang mendukung terselesaikannya penelitian ini, yaitu kepada pihak yang terhormat :

1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si sebagai Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si. sebagai Ketua Prodi Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Yulia Saftiana, S.E., M.Si., Ak. sebagai Dosen Pembimbing Pertama dan Bapak Dr. Muizzuddin, S.E., M.M. sebagai Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bantuan, waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan arahan, saran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si. dan ibu Dr. Relasari, S.E., M.Si., Ak sebagai Dosen Penguji Tesis yang telah memberikan bantuan, waktu, tenaga dan memberikan arahan serta saran kepada penulis dalam perbaikan tesis ini.
6. Seluruh Dosen S-2 Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan.

7. Orang tua tercinta, Papa Ahmadu Muchtar, Mama Almh. Ariyati Damaria telah memberikan dukungan cinta kasih sayang, nasehat dan support yang sangat luar biasa, dorongan moril dan materil yang tidak terhingga serta selalu mendoakan penulis dalam setiap langkahnya dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Saudara ku Eva Sunia Hatina yang selalu mendukung, memberikan bantuan moril dan materil dan menjadi motivasi serta menghibur penulis dan menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Kepada Intan Kumala Sari, S.E., M.Si., Ak telah memberikan support yang luar biasa kepada penulis dan dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama penyusunan tesis ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Kepada DGA 1 dan DGA 2 telah menyemangati, dan menghibur penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Para Staff Akademik dan perpustakaan S-2 Ilmu Ekonomi Universitas Sriwijaya, yang telah membantu penulis sejak awal sampai akhir perkuliahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini merupakan hasil kerja sama dari berbagai pihak sehingga dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Yulia Saftiana, S.E., M.Si., Ak sebagai Dosen Pembimbing Pertama dan Bapak Dr. Muizzuddin, S.E., M.M sebagai Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bantuan, waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan arahan, saran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Penguji Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si. dan Ibu Dr. Relasari, S.E., M.Si., Ak sebagai dosen penguji yang telah memberikan bantuan, waktu serta arahan dan saran untuk memperbaiki tesis penulis sehingga tesis yang dihasilkan lebih baik lagi.
3. Prof Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si. sebagai Ketua Prodi Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
5. Orang tua, saudara, dan keluarga yang telah memberikan semangat, dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan.

Palembang, 5 Juli 2024

Ahmad Sayudi Rahmat Hidayat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Ahmad Sayudi Rahmat Hidayat

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 20 Desember 1982

Agama : Islam

Alamat Rumah : Jalan Bank Raya VII No. 45 Palembang

Alamat Email : 45rg45rg@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. SD Pusri Palembang
2. SMP Pusri Palembang
3. SMA Pusri Palembang
4. S-1 Fakultas Ekonomi Akuntansi
Universitas Islam Indonesia

ANALISIS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN FISKAL PADA PROVINSI SUMATERA SELATAN.docx

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	1%
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
3	moam.info Internet Source	< 1%
4	www.docstoc.com Internet Source	< 1%
5	Submitted to Universitas Negeri Surabaya Student Paper	< 1%
6	Submitted to Trisakti University Student Paper	< 1%
7	Devie Octariani, Akram Akram, Animah Animah. "ANGGARAN BERBASIS KINERJA, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN KUALITAS ANGGARAN SKPD (Suatu Pengujian Struktural)", Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2017	< 1%

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE-BASED BUDGET
AND GOOD GOVERNANCE IN IMPROVING FISCAL INDEPENDENCE
IN THE PROVINCE OF SOUTH SUMATRA**

ABSTRACT

This research aims to analyze and test the effect of performance-based budgeting, the implementation of good governance on fiscal independence in South Sumatra Province. This research data uses secondary data retrieved from the Directorate General of Fiscal Balance and the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia in 15 Regencies/Cities in South Sumatra Province with the panel data (time series and cross section). The analysis technique in this research is quantitative with panel data regression analysis tools. The results of the research show that (1) the implementation of Performance- based Budgeting and Good Corporate Governance (GCG) has a positive and significant effect on fiscal independence (2) Simultaneously shows that the implementation of Performance-based Budgeting and Good Corporate Governance (GCG) has a positive and significant to fiscal independence. Limitations in this research include the lack of empirical data on GCG-based budgeting and reliance on BPK Opinion projections as a substitute. However, it is hoped that the use of BPK Opinion projections can provide a fairly accurate picture of how GCG principles are applied in regional budget management.

Keywords : fiscal independence, performance-based budgeting, good governance

Palembang, 5 Juli 2024

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Dr. Yulia Saftiana, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196707011992032003

Pembimbing Kedua,



Dr. Muizzudin, S.E., M.M
NIP. 198711212014041001

Ketua Program Studi



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

**ANALISIS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN GOOD
GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN FISKAL
PADA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menguji pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, penerapan *Good Governance* terhadap kemandirian fiskal pada Provinsi Sumatera Selatan. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan jenis data yaitu data panel yang merupakan gabungan antara *time series* dan *crosssection data*. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan alat analisis regresi Data Panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal (2) Secara simultan menunjukkan bahwa penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu mencakup kurangnya data empiris tentang anggaran berbasis GCG dan ketergantungan pada proyeksi Opini BPK sebagai substitusi. Meskipun demikian, diharapkan bahwa penggunaan proyeksi Opini BPK dapat memberikan gambaran yang cukup akurat tentang bagaimana prinsip-prinsip GCG diterapkan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Kata Kunci : kemandirian fiskal, anggaran berbasis kinerja, *good governance*

Palembang, 5 Juli 2024

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



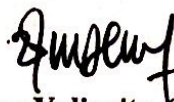
Dr. Yulia Saftiana, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196707011992032003

Pembimbing Kedua,



Dr. Muizzudin, S.E., M.M
NIP. 198711212014041001

Ketua Program Studi



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 1 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1.Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory).....	12
2.1.2 Anggaran Berbasis Kinerja.....	16
2.1.3 Good Governance	19
2.1.4 Kemandirian Fiskal.....	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
2.3 Alur Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Lingkup Penelitian.....	41
3.2 Pendekatan Penelitian	41
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
3.4 Fokus Penelitian.....	41
3.5 Populasi dan Sampel.....	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.7 Jenis dan Sumber Data.....	43
3.8 Teknik Analisa Data	44
3.9 Definisi Operasional Variabel	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41

4.1 Hasil Penelitian.....	52
4.1.1 Analistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	52
4.1.2 Hasil Estimasi	54
4.1.3 Uji Asumsi Klasik.....	56
4.1.4 Uji Statistik	61
4.2 Hasil dan Pembahasan	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	91
5.3 Saran	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan pola kepemimpinan nasional dari masa orde baru menjadi masa reformasi telah membawa perubahan pada kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai aspek termasuk pola hubungan pemerintahan antara pemerintah daerah. Jika pada masa orde baru sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yang ternyata menimbulkan ketidakadilan di seluruh daerah, sejak tahun 2001 dirubah menjadi era desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001 membawa implikasi pada pelimpahan wewenang antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang. Kebijakan terkait yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini dalam perkembangannya diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Diberlakukannya undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 berintikan pembagian kewenangan dan fungsi (*power sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengatur pembagian sumber-sumber daya keuangan (*financial sharing*) antara pusat-daerah didesain dengan menggunakan prinsip *money follow function* atau uang mengikuti kewenangan. Artinya, penyerahan kewenangan daerah juga

diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat (Mahi, 2001).

Aspek penting dari otonomi daerah atau desentralisasi adalah demokratisasi dan pemberdayaan. Otonomi daerah sebagai perwujudan dari demokratisasi maksudnya adalah adanya kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, di mana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Sedangkan otonomi daerah sebagai wujud dari pemberdayaan daerah merupakan suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan aspirasi masyarakatnya sendiri. Dengan demikian, daerah secara bertahap akan berupaya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan kepada pusat (Rusdiana, 2017).

Penyusunan anggaran atau penganggaran (*budgeting*) merupakan salah satu tahapan yang dominan dalam proses pengendalian manajemen, serta menjadi salah satu fungsi utama dari pemerintah (Caleb & Agbude, 2014). Anggaran menjadi salah satu hal yang kritis dalam menjamin terlaksananya strategi dan program suatu organisasi dengan efektif dan efisien karena anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Anggaran yang disusun harus benar-benar didasarkan atas analisa mendalam terhadap kebutuhan atas kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa datang (Kindangen *et al.*, 2022).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, merupakan kesepakatan antara legislatif dan eksekutif yang memberi informasi rinci kepada masyarakat tentang program yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-

program tersebut dibiayai. Untuk menyusun APBD, Pemerintah Daerah melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun anggaran berpedoman kepada pagu anggaran. Kegiatan perencanaan dan penganggaran yang melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di SKPD mulai dari penentuan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, penentuan standar belanja, penentuan indikator kinerja dan target kinerja, sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan, memerlukan perhatian yang serius bagi pimpinan SKPD beserta pelaksana program dan kegiatan (Kindangen *et al.*, 2022).

Suatu anggaran untuk dapat memiliki kualitas yang baik dibutuhkan proses pengalokasian anggaran yang tepat dan sesuai, serta diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran dapat secara bijak merumuskan dan menetapkan suatu program dan kegiatan berdasar pada aspirasi masyarakat. Handayani (2009) menyatakan bahwa penyusunan anggaran yang mengedepankan prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan menggunakan pendekatan kinerja akan menyebabkan meningkatnya kualitas anggaran (Harpranisa *et al.*, 2020).

Kesalahan-kesalahan dalam hal penganggaran dapat terjadi akibat kegagalan menerjemahkan konsep penyusunan anggaran. Aparatur penyusun anggaran harus mampu memahami prosedur dan ketentuan-ketentuan yang bersifat fundamental yang perlu diperhatikan serta kemampuan rasional untuk mengerti secara keseluruhan maksud yang tertuang dalam dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman penyusunan anggaran SKPD.

Provinsi Sumatera Selatan menghadapi beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap konsep anggaran berbasis kinerja di kalangan pejabat pemerintahan dan pelaku keuangan provinsi. Hal ini menyulitkan implementasi yang efektif dan membatasi kemampuan provinsi untuk mencapai kemandirian fiskal secara optimal (Djpk.kemenkeu.go.id, 2017).

Selain itu, kesesuaian antara anggaran berbasis kinerja dan kebutuhan daerah juga menjadi tanda tanya. Proses perencanaan anggaran yang terfokus pada indikator kinerja bisa menyebabkan tidak terpenuhinya seluruh kebutuhan dan target pembangunan yang spesifik bagi Provinsi Sumatera Selatan. Dampaknya, potensi kemandirian fiskal provinsi menjadi terbatas (Manuong & Utari, 2020). Kurangnya transparansi dan akuntabilitas anggaran juga menjadi tantangan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diajag tersebut penting untuk mendorong good governance. Namun, kurangnya informasi publik mengenai alokasi dana, pengeluaran, dan pencapaian kinerja dapat mengganggu pemantauan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya dan kebijakan anggaran. Hal ini memiliki dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat dan menyulitkan upaya pencapaian kemandirian fiskal provinsi (Harpranisa *et al.*, 2020).

Rendahnya pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja juga menjadi isu krusial. Kemandirian fiskal yang optimal membutuhkan mekanisme pemantauan yang efektif, evaluasi yang baik, dan penilaian kinerja yang objektif. Namun, kurangnya sistem pemantauan yang memadai dan kapasitas rendah dalam evaluasi mengakibatkan sulitnya mengidentifikasi kelemahan serta kurangnya efisiensi dan efektivitas dalam pengeluaran fiskal, kurangnya partisipasi publik dan peran masyarakat sipil menambah kompleksitas

dalam penerapan anggaran berbasis kinerja dan good governance di Provinsi Sumatera Selatan. Partisipasi yang terbatas serta minimnya peran masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan dan pengawasan mendorong pemahaman yang terbatas terkait anggaran publik. Ketidakberdayaan masyarakat sipil dalam pengawasan independen terhadap pengelolaan keuangan tidak hanya membatasi kemajuan dalam mencapai kemandirian fiskal, tetapi juga menghambat perkembangan accountability dalam pemerintahan (Digdowiseiso & Kaliwattu, 2023).

Dalam dunia korporat dan tata kelola organisasi, *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi tonggak utama yang mengatur bagaimana sebuah entitas dijalankan dan diawasi. Dimensi GCG mencakup aspek-aspek kunci yang membentuk landasan tata kelola yang sehat dan berkelanjutan. Partisipasi menjadi landasan pertama yang menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, mencakup para pemegang saham, manajemen, karyawan, dan komunitas luas (Rodriguez-Fernandez, 2016).

Keterbukaan menjadi pilar penting yang menuntut transparansi dalam segala aktivitas perusahaan, dengan menyediakan informasi yang jelas dan akurat bagi pemangku kepentingan guna memastikan pengawasan yang efektif. Akuntabilitas memegang peranan penting dalam menegaskan kewajiban para pengambil keputusan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta menyajikan laporan yang terperinci tentang kinerja organisasi. Responsifitas menjadi ciri yang menandai kemampuan organisasi untuk merespons kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan dengan cepat (Hamdani, 2016).

Penegakan hukum menjadi prinsip yang menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan norma yang berlaku, baik dalam internal organisasi maupun dari segi regulasi eksternal. Kesetaraan dan kewajaran menekankan perlunya perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak yang terlibat, serta alokasi sumber daya yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan memperhatikan dan menerapkan dimensi GCG ini secara konsisten, sebuah organisasi dapat membangun fondasi yang kokoh untuk tata kelola yang baik, meningkatkan kinerja jangka panjang, mengurangi risiko, dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan serta masyarakat secara keseluruhan (Aspan, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2011) dan Sriwijayanti (2018) membuktikan bahwa akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi publik, dan pendekatan kinerja secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas APBD. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Carlitz, (2013) yang memperoleh hasil bahwa transparansi yang lebih besar didalam proses anggaran dapat berdampak pada hasil pembangunan dan pengeluaran dan penelitian Octariani (2017) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara good governance dan penganggaran yang baik. Penelitian Klase & Dougherty (2008) menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran kinerja berpengaruh signifikan dan positif pada hasil anggaran diukur dengan pengeluaran per kapita. Dari uraian diatas menunjukkan anggaran yang berbasis kinerja dan penerapan *good governance* menjadi aspek penting dalam penyusunan anggaran. Hal ini akan berimplikasi pada bagaimana anggaran itu disusun dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai kemandirian fiskal pada suatu daerah termasuk Provinsi

Sumatera Selatan sejak diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan keleluasaan dalam menyusun anggaran.

Provinsi Sumatera Selatan merapkan praktik dalam kemandirian fiskal yang melibatkan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan praktik *Good Governance* dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Fenomena ini mencerminkan komitmen pemerintah provinsi untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien dalam pengelolaan keuangan publik. Penerapan ABK menjadi sorotan utama dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran. Pendekatan ini memungkinkan penetapan anggaran yang lebih terukur, dengan memperhatikan pencapaian kinerja yang konkret sebagai dasar alokasi dana. Dengan demikian, ABK diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya dengan lebih bertanggung jawab dan fokus pada hasil yang diinginkan (Kementerian Keuangan, 2020).

Praktik *Good Governance* juga menjadi fokus penting, Provinsi Sumatera Selatan berusaha untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik menjadi landasan bagi setiap keputusan keuangan yang diambil. Transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, dan keadilan menjadi prinsip yang dijunjung tinggi dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi ABK dan praktik *Good Governance* sering kali dihadapkan pada kendala struktural, seperti kurangnya kapasitas institusi, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya sumber daya. Oleh karena itu, meskipun terdapat komitmen yang kuat, perjalanan menuju kemandirian fiskal yang lebih baik tidak selalu berjalan lancar (Marliyana *et al.*, 2021).

Research Gap penelitian ini dijelaskan oleh dalam penelitian sebelumnya, beberapa hasil positif telah diungkapkan dari kajian sebelumnya terkait dengan penerapan anggaran berbasis kinerja (ABK) dan *good governance*. Temuan-temuan ini mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Praktik ABK telah membantu dalam mengukur kinerja dengan lebih baik dan mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Sementara itu, *good governance* telah menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Dari perspektif teoritis, pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan publik, dengan ABK memberikan kerangka kerja untuk pengukuran kinerja yang lebih baik, sementara *good governance* menciptakan dasar untuk integritas dan keandalan informasi (Desiana, Nur Wardani, Silvia, 2021; Marliyana *et al.*, 2021; Marta *et al.*, 2017; Sirait *et al.*, 2022).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hasil yang negatif dari penerapan ABK dan *good governance* belum sepenuhnya tercapai. Kemungkinan adanya kendala dalam implementasi, kurangnya komitmen politik, atau faktor-faktor struktural lainnya mungkin telah membatasi efektivitasnya. Secara teoritis, ada kemungkinan bahwa penerapan ABK tidak selalu menghasilkan hasil yang diinginkan, terutama jika indikator kinerja yang dipilih tidak tepat atau jika terjadi manipulasi data. Begitu pula, *good governance* tidak selalu dapat terwujud dengan baik dalam praktiknya, dan faktor-faktor seperti politik, korupsi, atau kurangnya sumber daya dapat menghambat pencapaian prinsip-prinsip *good governance* (Afandi & Tarigan, 2016; Aspan, 2017; Choi, 2018; Klase & Dougherty, 2008; Kurrohman, 2013; Panda & Leepsa, 2017).

Berdasarkan konteks teoritis, pendekatan ABK dan *good governance* memiliki fokus yang berbeda namun saling melengkapi. ABK menekankan pada pengukuran kinerja dan pengambilan keputusan berbasis data, sementara *good governance* menyoroti prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan aturan hukum. Interaksi antara keduanya dapat memperkuat efek positifnya, dengan penerapan ABK yang baik mendukung praktik *good governance* dan sebaliknya (Carlitz, 2013; Digdowiseiso & Kaliwattu, 2023), perbedaan antara temuan positif dan negatif serta perspektif teoritis yang mendasarinya dengan demikian penelitian ini akan menguji dan menganalisis pengaruh penerapan ABK dan *good governance* terhadap kemandirian fiskal di Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kemandirian fiskal pada Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah terdapat pengaruh penerapan *good governance* terhadap kemandirian fiskal pada Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah terdapat pengaruh anggaran berbasis kinerja dan penerapan *good governance* terhadap kemandirian fiskal pada Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kemandirian fiskal pada Provinsi Sumatera Selatan.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *good governance* terhadap kemandirian fiskal pada Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh anggaran berbasis kinerja dan penerapan *good governance* terhadap kemandirian fiskal pada Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian dijelaskan sebagai berikut :

a. Manfaat Teoretis

1. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang konsep ABK, termasuk prinsip-prinsip dasarnya, strategi penerapannya, serta dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik di tingkat provinsi.
2. Penelitian ini dapat menunjukkan sejauh mana penerapan ABK dan *good governance* telah berkontribusi pada peningkatan kemandirian fiskal provinsi tersebut. Hal ini akan memberikan informasi berharga bagi pembuat kebijakan tentang strategi yang efektif dalam meningkatkan kemandirian fiskal di tingkat daerah.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat pengetahuan mengenai pengaruh anggaran berbasis kinerja dan penerapan *good governance* dalam mewujudkan kemandirian fiskal.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bahan pertimbangan dalam mewujudkan kemandirian fiskal dengan mempertimbangkan pengaruh anggaran berbasis kinerja dan penerapan *good governance*.

3. Bagi Instansi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai pengaruh anggaran berbasis kinerja dan penerapan *good governance* dalam mewujudkan kemandirian fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. N., & Tarigan, F. F. A. (2016). Analisis Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 93–110.
- Apriani, F. (2015). Evaluasi Anggaran Kinerja Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang Performance-Based Budgeting Evaluation in Bontang Regional Civil Service Agency. *Spirit Publik*, 10(1), 1–18.
- Ardyansah, D., & Zulaikha. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio, dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–9.
- Arief, M. S. (2020). the Evaluation of the Performance Based Budgeting in Health, Education, and Public Works Agencies of Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province. *Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 9(1), 39. <https://doi.org/10.32833/majem.v9i1.110>
- Aspan, H. (2017). *Good Corporate Governance Principles In The Management Of Limited Liability Company. International Journal of Law Reconstruction*, 1(1), 87.
- Ben-Caleb, E., & Agbude, G. (2014). Good Budgeting and Good Governance: A Comparative Discourse. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2478725>
- Binawati, E. (2015). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Sektor Publik Studi pada Pemerintah DIY. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan ...*, 18(1). <http://jurnalwahana.aaykpn.ac.id/wahana/article/view/98>
- Carlitz, R. (2013). Improving Transparency and Accountability In The Budget Process: An Assessment of Recent Initiatives. *Development Policy Review*, 31, s49–s67.
- Choi, F. (2018). How To Establish a Good Government? Lessons from Lee Kuan Yew in Singapore and Deng Xiaoping in China. *Public Administration and Policy: An Asia-Pacific Journal*, 21. <https://doi.org/10.1108/PAP-10-2018-007>
- Desiana, Nur Wardani, Silvia, dewi. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Lpmp) Provinsi Lampung. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, 6(1), 47–56. <https://doi.org/10.35968/jbau.v6i1.625>
- Dewi, N. A. W. T., & Wiguna, I. G. N. H. (2019). Evaluasi Penerapan Performance Based Budgeting pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 201–222.
- Digdowiseiso, K., & Kaliwattu, D. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal Dan Efektivitas Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 219–228. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.573>
- Dipayana, M., Triuwono, I., & Andayani, W. (2017). The Process of Performance Based

- Budgeting in Probolinggo City by Utilizing SIMRAL: A Phenomenology Study. *Journal of Accounting and Business Education*, 1, 113. <https://doi.org/10.26675/jabe.v1i1.9753>
- Djpk.kemenkeu.go.id. (2017). *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*. [www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).
- Farwitawati, R. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintahan Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Unilak*, 13(2).
- Gujarati, Damonar, N., & Dawn, C. P. (2013). *Dasar-dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 2 (Terjemahan Raden Carlos Mangunsong)*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah* (1st ed.). Salemba Empat.
- Hamdani, M. (2016). *Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Agency Theory*. *Semnas Fekon, 2016*, 279–283.
- Handayani, B. D. (2011). Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran terhadap Kualitas APBD Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3(1).
- Harpranisa, F., Ronanda, C., & Sulistiyowati, F. (2020). Good Government Governance dan Kualitas Anggaran. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 3(1), 50–68. www.jaga.unand.ac.id
- Hornal Kenal Ontorael, Debby Ch. Rotinsulu, E. N. W. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(1), 61–75.
- Huong, G. N. T., Thai, H. M., & Binh, D. T. (2023). *Agency Theory in University Governance and the Role of Internal Audit: From the Private Sector Perspectives to the Case of Vietnamese Public Higher Education Institutions*. Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-076-3_46
- Kementerian Keuangan. (2020). *Laporan Kinerja Anggaran 2021*. [Djpk.Kemenkeu.Go.Id. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd)
- Klase, K. A., & Dougherty, M. J. (2008). The Impact of Performance Budgeting on State Budget Outcomes. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 20(3), 277–298. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-20-03-2008-B001>
- Kuntadi, C., & Livrianti, N. (2022). Influence Effectiveness Of Performance-Based Budgeting Performance Control On Bitung City Department Of Education. *Journal Research of Social, Science, Economics, and Management*, 2. <https://doi.org/10.36418/jrssem.v2i04.279>
- Kurrohman, T. (2013). Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan yang Berbasis. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(1), 1–11.
- Mahi, R. (2001). Fiscal Decentralization: Its Impact on Cities Growth. *Jurnal Ekonomi*

Dan Pembangunan Indonesia, 2(1), 1–20.

- Marliyana, N., Ishak, J. F., & Hastuti. (2021). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 544–550.
- Marta, M. S., Kurniasari, D., & Kurniasari, D. (2017). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i2.1446>
- Michael, J., & William, M. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Mulihartanti. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Kinerja “A.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(1), 54–64. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/35755>
- Mulyono, A. A., & Hertianti, A. (2019). Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Rangka Mewujudkan Good Financial Governance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 275–290.
- Musyarrofah, E., & Amanah, L. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, dan Size Terhadap Cash Effective Tax Rate. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(9), 1–16.
- Octariani, D. (2017). Good Governance, Performance Based Budgeting and SKPD Budget Quality SKPD (The Case of a Structural Model Approach). (*JKAP*) *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 21(2), 117–131. <https://journal.ugm.ac.id/jkap>
- Octariani, D., Akram, A., & Animah, A. (2017). Anggaran Berbasis Kinerja, Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran SKPD. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2, 27. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i1.3621>
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency Theory: Review of Theory And Evidence on Problems And Perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95.
- Rahmat, A. F., Rahmanto, F., Firmansyah, M. I., & Mutiarin, D. (2020). Spending Review Berbasis Performance-based Budgeting (Pbb) terhadap APBD Kabupaten Sleman Tahun 2017-2018. *Reformasi*, 10(2), 186–208. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1676>
- Ramadhani, P., Haliah, H., Kusumawati, A., & Husni, M. (2023). Komitmen Organisasi , Kualitas Sumber Daya Dan Reward Terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 52–59.
- Rezariski, A. O. (2020). Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(4). <https://doi.org/10.36418/jiss.v1i4.43>

- Robinson, M., & Brumby, J. (2005). Does Performance Budgeting Work? *IMF Working Paper Fiscal*, 5.
- Rodriguez-Fernandez, M. (2016). Social Responsibility and Financial Performance: The Role Of *Good Corporate Governance*. *BRQ Business Research Quarterly*, 19(2), 137–151.
- Rusdiana, A. (2017). Analisis Kemandirian Fiskal Dalam Era Otonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah*.
- Schick, A. (2003). The Performing State Reflection on an Idea Whose Time Has Come but Whose Implementation Has Not. In *The Performing State Reflection on an Idea Whose Time Has Come but Whose Implementation Has Not*. OECD Publishing.
- Silvia Ningsih, Afridian Wirahadi, & Amy Fontanella. (2018). Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dengan Konsep Money Follow Program Dalam Perencanaan dan Penganggaran Kota Padang . *Akuntansi Dan Manajemen*, 13(1 SE-Articles), 1–16. <https://doi.org/10.30630/jam.v13i1.28>
- Sirait, L. R. N., Delvianti, & Ardiany, Y. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Pareso*, 4(1), 169–185.
- Sofyani, H., & Prayudi, M. A. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Di Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Kinerja “A.” *Jurnal Ilmiah Akutansi Dan Bisnis*, 13(1), 54–64.
- Sriwijayanti, H. (2018). Analisis pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap pengelolaan APBD (Studi persepsi pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Ekobistek*, 89–101.
- Sterry Kindangen, R., P.E. Saerang, D., & Swandari Budiarmo, N. (2022). Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL”, 1 3 (2), 2022. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “GOODWILL,”* 3(2), 164–178.
- Sugiono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta Bandung*, 16.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Suharnoko, D. (2019). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Kehutanan Upt Kph Bali Tengah Kota Singaraja). *Karta Rahardja: Jurnal Pembangunan Dan Inovasi*, 1(2), 1–13. <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr/article/view/25%0Ahttps://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr/article/download/25/18>
- Suriani, S. (2015). The Influence of Performance Based Budget Implementation on Performance Accountability of Government Institution (A Study in Regional Work Unit of Bandung City). *Information Management and Business Review*, 7, 6–22.

<https://doi.org/10.22610/imbr.v7i4.1158>

- Suwanda, D., Moenek, R., Lukman, S., & Syaifullah, M. (2021). The Implementation of Performance-Based Budgeting Through A Money Follow Program in Impressing Budget Corruption. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 871. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1576>
- Taufiqurrahman. (2014). Pelaksanaan ABK di Pemerintahan Daerah. *Jejaring Administrasi Publik*, 6(2), 511–519.
- Verasvera, F. A. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Maranatha*, 15(2).
- Winamo, W. (2007). *Analisis Ekonometrika dan Statistik : EViews* (1st ed.). UPP STIM YKPN.
- Yogivaria, D. W., & Alfinur, A. (2016). Kajian Fenomologis Anggaran Berbasis Kinerja Pada Rumah Sakit Baptis Batu. *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, 12(3), 117. <https://doi.org/10.21067/jem.v12i3.1410>
- Yuhertiana, I., & Fatun, F. (2020). Performance-Based Budgeting in Public Sector and Managerial Performance with Leadership as Moderating Variable. *International Journal of Service Management and Sustainability*, 5, 177. <https://doi.org/10.24191/ijSMS.v5i1.9865>
- Yusuf, M. (2020). The Impact of Local Government Accounting Systems and Performance-Based Budgeting on Local Government Performance Accountability. *Jurnal Economic Resource*, 3(2), 60–68. <https://doi.org/10.57178/jer.v3i2.225>